



PERAN KEPEMIMPINAN PENGEMBANGAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH

Sherdillah

Bimbingan dan Konseling, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*Penulis koresponden, email: sherdillah494@gmail.com

Abstract: Cases of sexual violence in schools are a big challenge in the world of education. This study aims to analyze the role of school principal leadership in preventing sexual violence at SMKN 2 Banjarmasin. A qualitative approach with an exploratory descriptive method is used to explore data through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that school principals take proactive steps through the formation of the Violence Prevention and Handling Team (TPPK), the implementation of routine socialization programs such as "Friday Giat," and collaboration with external institutions such as KPAI and BNN. In addition, a data-based approach through the Learning Management System (LMS) and Digital Information System (SID) applications is used to monitor program effectiveness and student behavior. Challenges include the low courage of students to report cases of sexual violence due to stigma and the lack of a confidential reporting system. The conclusion of this study emphasizes the importance of the transformational leadership role of school principals in creating a safe and supportive school environment, with suggestions to strengthen socialization, empathy training for teachers, and the development of confidential and trusted reporting system.

Keywords: Sexual violence in schools; Principal leadership; Prevention of sexual violence

Abstrak: Kasus kekerasan seksual di sekolah menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepemimpinan kepala sekolah dalam mencegah kekerasan seksual di SMKN 2 Banjarmasin. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif digunakan untuk menggali data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah mengambil langkah proaktif melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), pelaksanaan program sosialisasi rutin seperti "Jumat Giat," serta kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti KPAI dan BNN. Selain itu, pendekatan berbasis data melalui aplikasi Learning Management System (LMS) dan Sistem Informasi Digital (SID) digunakan untuk memantau efektivitas program dan perilaku siswa. Tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya keberanian siswa untuk melaporkan kasus kekerasan seksual akibat stigma dan kurangnya sistem pelaporan yang rahasia. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya peran kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung, dengan saran untuk memperkuat sosialisasi, pelatihan empati bagi guru, dan pengembangan sistem pelaporan yang rahasia dan terpercaya.

Kata Kunci: Kekerasan seksual di sekolah; Kepemimpinan kepala sekolah; Pencegahan kekerasan seksual

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah telah menjadi salah satu tantangan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas perkembangan karakter dan kompetensi siswa, sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Dalam konteks ini, peran kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pengembangan budaya sekolah yang inklusif dan bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual (Hidayah, 2016).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMKN 2 Banjarmasin, kepala sekolah menunjukkan kepemimpinan yang proaktif dalam mengembangkan kebijakan dan program yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan seksual di sekolah. Langkah-langkah konkret yang telah diterapkan mencakup pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), yang bertugas menangani dan mencegah kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Selain itu, kepala sekolah menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga eksternal, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk memperkuat upaya perlindungan siswa. Program-program inovatif, seperti kegiatan “Jumat Giat,” digunakan sebagai media penyuluhan kepada siswa dan guru, sementara poster dan materi edukasi anti kekerasan seksual disebarakan di berbagai sudut sekolah untuk meningkatkan kesadaran.

Program “Jumat Giat” merupakan salah satu inovasi signifikan yang dilaksanakan secara konsisten untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan saling menghormati. Dalam program ini, siswa tidak hanya mendapatkan sosialisasi dari pakar, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam kegiatan yang memperkuat karakter dan nilai-nilai moral. Penyebaran poster edukasi anti kekerasan juga menjadi elemen penting dalam membangun budaya sekolah yang inklusif. Poster-poster ini mengingatkan siswa tentang hak mereka untuk merasa aman dan langkah-langkah yang dapat diambil jika mengalami atau mengetahui adanya kasus kekerasan seksual.

Kepemimpinan kepala sekolah di SMKN 2 Banjarmasin tidak hanya berorientasi pada kebijakan administratif, tetapi juga pada pendekatan inovatif berbasis data. Dengan menggunakan *Learning Management System* (LMS) dan Sistem Informasi Digital (SID), kepala sekolah dapat memantau kinerja guru serta perilaku siswa secara lebih terukur dan sistematis. Data yang dihasilkan dari sistem ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pencegahan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Pendekatan berbasis teknologi ini merupakan cerminan transformasi pendidikan yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas (Selian & Restya, 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Pemimpin yang memiliki visi dan kemampuan reflektif, seperti kepala sekolah di SMKN 2 Banjarmasin, mampu merancang kebijakan strategis yang menjawab isu-isu kompleks, termasuk kekerasan seksual. Kemampuan ini tidak hanya mencakup pengelolaan sumber daya sekolah secara efektif tetapi juga keberanian untuk berinovasi dan menjalin kemitraan dengan pihak eksternal untuk mendukung keberlanjutan program (Sanchez et al., 2001).

Melalui langkah-langkah tersebut, SMKN 2 Banjarmasin berhasil menunjukkan komitmen untuk menjadi sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruharganya. Meskipun

demikian, tantangan tetap ada, seperti memastikan seluruh siswa merasa cukup percaya diri untuk melaporkan kasus kekerasan seksual tanpa rasa takut atau stigma. Dengan memperkuat pendekatan berbasis empati dan menyediakan sistem pelaporan yang lebih rahasia, sekolah dapat terus meningkatkan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Langkah-langkah ini menempatkan SMKN 2 Banjarmasin sebagai contoh sekolah yang memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan siswa dalam kerangka kepemimpinan yang responsif dan inovatif.

Namun, meskipun berbagai langkah telah diambil, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada, terutama dalam memastikan implementasi kebijakan yang konsisten dan menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam peran kepemimpinan kepala sekolah dalam mencegah kekerasan seksual, dengan fokus pada strategi pengembangan kebijakan, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan pengelolaan program-program berbasis data.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif untuk memahami peran kepemimpinan kepala sekolah dalam mencegah kekerasan seksual di SMKN 2 Banjarmasin. Penelitian dilaksanakan di SMKN 2 Banjarmasin, sebuah sekolah menengah kejuruan yang dikenal dengan kebijakan inovatif dalam pengelolaan lingkungan sekolah, selama tiga bulan, dari Januari hingga Maret 2024. Dalam penelitian ini, subjek yang terlibat terdiri dari kepala sekolah sebagai pemimpin utama, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru Bimbingan dan Konseling (BK), siswa, serta perwakilan orang tua siswa atau masyarakat sebagai stakeholder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas di sekolah, termasuk program pencegahan kekerasan seksual dan interaksi antara kepala sekolah dengan warga sekolah. Wawancara mendalam dilakukan dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan stakeholder lainnya untuk menggali informasi terkait strategi dan tantangan dalam pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen resmi sekolah seperti visi-misi, kebijakan tertulis, laporan kegiatan, dan materi sosialisasi terkait pencegahan kekerasan seksual.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui beberapa langkah, dimulai dengan reduksi data, yaitu merangkum dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan interpretasi dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan yang muncul, yang kemudian diverifikasi melalui triangulasi data. Penelitian ini dilakukan dalam empat siklus: Siklus pertama, eksplorasi awal untuk mengumpulkan data tentang konteks dan kebijakan sekolah; Siklus kedua, analisis dan refleksi terhadap data yang diperoleh untuk menentukan fokus penelitian yang lebih spesifik; Siklus ketiga, verifikasi dan penguatan temuan dengan triangulasi data; dan Siklus keempat, penyusunan laporan sistematis yang mencakup temuan dan rekomendasi. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran kepala sekolah dalam pencegahan kekerasan seksual serta strategi dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepala Sekolah dalam Mencegah Kekerasan Seksual

Kepemimpinan kepala sekolah di SMKN 2 Banjarmasin memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Dengan pendekatan proaktif, kepala sekolah menginisiasi pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang bertugas menangani isu-isu kekerasan seksual secara sistematis. Kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat efektivitas tim ini dalam memberikan perlindungan kepada siswa. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan melindungi hak-hak siswa (Leithwood et al., 2020).

Sebagai bagian dari upaya preventif, kepala sekolah juga mengintegrasikan program-program sosialisasi ke dalam rutinitas sekolah, seperti melalui kegiatan "Jumat Giat." Kegiatan ini melibatkan pakar eksternal yang memberikan penyuluhan kepada siswa dan guru terkait isu-isu sensitif, termasuk pentingnya menghormati sesama. Selain itu, penyebaran poster edukasi di berbagai area sekolah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya kekerasan seksual dan langkah-langkah untuk melindungi diri. Program-program ini mencerminkan penerapan teori kepemimpinan transformasional yang bertujuan membangun budaya sekolah yang inklusif (Ananingsih & Kurniawan, 2018).

Namun, meskipun berbagai langkah telah dilakukan, tantangan dalam pelaksanaan program tetap ada. Salah satu kendala utama adalah kurangnya keberanian siswa untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami atau saksikan. Rasa takut akan stigma, kurangnya privasi dalam sistem pelaporan, dan kurangnya kepercayaan kepada pihak sekolah menjadi hambatan signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya membangun kepercayaan antara siswa dan sekolah dalam menangani isu-isu sensitive (Rangkuti & Maksum, 2019).

Kepala sekolah mencoba mengatasi tantangan ini dengan pendekatan berbasis data menggunakan aplikasi seperti Learning Management System (LMS) dan Sistem Informasi Digital (SID). Teknologi ini memungkinkan pemantauan yang lebih sistematis terhadap aktivitas siswa dan guru, sehingga program pencegahan dapat dievaluasi dan ditingkatkan berdasarkan data yang akurat. Selain itu, kepala sekolah terus menjalin komunikasi intensif dengan siswa, guru, dan orang tua untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan.

Keberhasilan kepala sekolah di SMKN 2 Banjarmasin dalam memimpin upaya pencegahan kekerasan seksual menunjukkan pentingnya peran kepemimpinan yang responsif dan inovatif. Melalui langkah-langkah strategis, termasuk kolaborasi dengan stakeholder eksternal, pemanfaatan teknologi, dan sosialisasi berkelanjutan, sekolah ini menjadi contoh yang baik dalam menciptakan budaya yang aman dan mendukung. Namun, agar efektivitas program ini dapat terus meningkat, diperlukan penguatan dalam hal kepercayaan siswa dan pengembangan sistem pelaporan yang lebih rahasia dan empati. Dengan demikian, sekolah dapat terus berkomitmen untuk melindungi siswa dari kekerasan seksual dan memastikan kesejahteraan mereka (Campbell, 2008).

2. Kebijakan dan Strategi dalam Menciptakan Lingkungan Sekolah Aman

Kepemimpinan kepala sekolah memainkan peran sentral dalam memastikan kualitas pendidikan dan keselamatan lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, kebijakan berbasis data yang diterapkan kepala sekolah menjadi inovasi penting. Melalui aplikasi seperti Sistem

Informasi Digital (SID) dan Learning Management System (LMS), kepala sekolah dapat memantau aktivitas guru dan siswa secara real-time. Sistem ini memungkinkan evaluasi program yang lebih efektif dan memastikan partisipasi aktif seluruh warga sekolah. Pendekatan ini mencerminkan upaya kepala sekolah untuk menghadirkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendidikan (Harris & Spillane, 2008).

Selain teknologi, kepala sekolah juga mengedepankan komunikasi sebagai sarana strategis untuk menyampaikan visi dan misi sekolah. Hal ini dilakukan melalui pertemuan langsung dengan guru, siswa, dan orang tua serta memanfaatkan media seperti banner, poster, dan publikasi lainnya. Strategi ini membantu menciptakan pemahaman kolektif mengenai tujuan bersama dan mendorong seluruh elemen sekolah untuk bekerja menuju pencapaian visi tersebut. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat budaya sekolah tetapi juga menegaskan kepemimpinan kepala sekolah yang berorientasi pada perencanaan strategis (Lapir, 2024).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya sosialisasi visi dan misi untuk membangun budaya sekolah yang inklusif dan mendukung perubahan perilaku. Dalam hal ini, SMKN 2 Banjarmasin menjadi contoh nyata implementasi kebijakan tersebut. Dengan strategi komunikasi yang baik, sekolah berhasil meningkatkan kesadaran warga sekolah tentang isu-isu sensitif, termasuk pencegahan kekerasan seksual. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab moral kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa (Ma'ruf, 2021)

Kepemimpinan kepala sekolah juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kolaborasi ini mendukung pengembangan program-program yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akademik tetapi juga kesejahteraan siswa secara menyeluruh. Dengan melibatkan pakar dan institusi terkait, kepala sekolah dapat memperluas cakupan program pencegahan kekerasan seksual, memberikan pelatihan kepada guru, serta menyediakan materi edukasi yang relevan untuk siswa dan orang tua.

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi kebijakan tersebut, terutama dalam menciptakan keberanian siswa untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Masalah seperti stigma sosial dan kurangnya kepercayaan siswa terhadap sistem pelaporan menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, sekolah perlu mengembangkan pendekatan berbasis empati dan menyediakan sistem pelaporan rahasia yang melindungi privasi siswa. Dengan langkah-langkah ini, kebijakan kepala sekolah tidak hanya akan lebih efektif tetapi juga memberikan rasa aman yang nyata bagi seluruh komunitas sekolah.

3. Kolaborasi dengan Stakeholder Eksternal

Kepala sekolah memiliki peran penting dalam membangun hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti industri, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat, untuk menciptakan sinergi antara kebutuhan pendidikan dan dunia kerja. Kerja sama ini juga bertujuan untuk menangani isu-isu sosial yang muncul di sekolah, seperti masalah kekerasan, perundungan, atau isu moralitas. Salah satu implementasi nyata adalah penyusunan kurikulum yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan industri tetapi juga memuat nilai-nilai etika dan moral, sehingga siswa memiliki kompetensi teknis yang memadai sekaligus karakter yang kuat.

Dalam membangun ekosistem pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja, kolaborasi dengan pemangku kepentingan menjadi salah satu langkah strategis. Kepala sekolah yang visioner memahami bahwa tantangan dunia pendidikan tidak dapat diselesaikan

secara parsial atau sektoral. Misalnya, kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak atau organisasi sosial lainnya membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung. Dengan pendekatan ini, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat pembentukan karakter yang mampu mencetak generasi berkualitas.

Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kolektif yang melibatkan komunitas dapat memberikan dampak jangka panjang pada efektivitas kebijakan sekolah. Yusuf (2023) menegaskan bahwa kepala sekolah yang melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan akan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Dalam praktiknya, kebijakan seperti program pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan lokal atau sosialisasi anti-kekerasan dapat menjadi contoh nyata bagaimana sinergi dengan masyarakat menghasilkan hasil yang positif (Yusuf, 2023).

Kolaborasi ini juga mencerminkan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan sekolah. Kepala sekolah tidak hanya bertindak sebagai administrator, tetapi juga sebagai inovator yang memimpin transformasi pendidikan di tingkat institusi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem manajemen pembelajaran (Learning Management System), kepala sekolah dapat mengawasi pelaksanaan kurikulum dan mengevaluasi efektivitas kebijakan secara lebih sistematis. Data dari sistem ini digunakan untuk memperbaiki kebijakan sekaligus memastikan bahwa setiap siswa mendapat manfaat maksimal dari program-program yang diterapkan (Susanto, 2023).

Dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, sekolah mampu menjawab tantangan dunia pendidikan modern, termasuk persaingan global yang semakin ketat. Kolaborasi antara sekolah dan pemangku kepentingan tidak hanya memperkuat program-program yang ada, tetapi juga membuka peluang inovasi baru yang relevan dengan kebutuhan siswa. Hal ini menempatkan kepala sekolah sebagai pemimpin transformasional yang tidak hanya peduli pada keberhasilan akademik, tetapi juga kesejahteraan dan masa depan siswa sebagai individu yang berkontribusi dalam masyarakat (Sukmawati, 2021).

4. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, implementasinya masih menghadapi hambatan signifikan, terutama dalam aspek pelaporan kekerasan seksual oleh siswa. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya tingkat keberanian korban untuk melaporkan insiden yang mereka alami. Penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual menjadi penghalang utama. Stigma ini menciptakan rasa malu, takut akan penghakiman, serta khawatir akan dampak negatif terhadap reputasi mereka di lingkungan sekolah maupun masyarakat (Nurratri Kurnia Sari & Linda Dian Puspita, 2019). Akibatnya, banyak siswa yang memilih untuk diam, meskipun mereka mengalami perlakuan yang tidak pantas.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kurangnya ruang aman bagi siswa untuk mengungkapkan masalah mereka. Dalam beberapa kasus, sistem pelaporan yang ada di sekolah belum sepenuhnya dirancang untuk menjaga kerahasiaan identitas korban, sehingga siswa merasa tidak yakin apakah pengaduan mereka akan diproses dengan cara yang melindungi privasi mereka. Selain itu, minimnya pendekatan berbasis empati dari beberapa tenaga pendidik juga menjadi kendala, di mana korban merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan dukungan yang memadai dari pihak sekolah. Kondisi ini memperburuk situasi,

sehingga insiden kekerasan seksual sering kali tidak terdeteksi dan pelaku tidak ditindak dengan tegas (Muljawan, 2018)

Untuk mengatasi permasalahan ini, sekolah perlu mengambil langkah proaktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberanian siswa untuk melapor. Pendekatan berbasis empati harus menjadi prioritas utama dalam pelatihan guru dan staf sekolah. Hal ini mencakup keterampilan mendengarkan aktif, memberikan dukungan emosional, serta memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara rahasia dan profesional. Selain itu, sistem pelaporan rahasia seperti hotline atau aplikasi khusus dapat dikembangkan untuk memberikan rasa aman kepada siswa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan siswa lebih percaya diri untuk berbicara tentang pengalaman mereka, sehingga kasus kekerasan seksual dapat ditangani dengan lebih efektif dan keadilan bagi korban dapat terwujud (Siregar, 2023).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan kepala sekolah sangat signifikan dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Kepala sekolah di SMKN 2 Banjarmasin telah menunjukkan kepemimpinan yang proaktif melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), pelaksanaan program sosialisasi, serta kolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk lembaga pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pendekatan berbasis data dengan memanfaatkan teknologi seperti LMS dan SID meningkatkan efektivitas pemantauan aktivitas dan kebijakan sekolah.

Kebijakan strategis kepala sekolah, seperti penguatan visi-misi sekolah melalui komunikasi intensif dan penerapan kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat, telah menciptakan budaya sekolah yang mendukung pembelajaran aman dan kondusif. Namun, tantangan masih ditemukan dalam bentuk kurangnya pelaporan kasus dari siswa, yang dapat disebabkan oleh stigma sosial dan kurangnya kepercayaan siswa kepada pihak sekolah.

REFERENSI

- Ananingsih, H. T., & Kurniawan, M. R. (2018). PERSEPSI GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN WALI MURID TENTANG FENOMENA KEKERASAN DI DUNIA MAYA TERHADAP ANAK. *Jurnal Fundadikdas (Fundamental Pendidikan Dasar)*, 1(3), 183. <https://doi.org/10.12928/fundadikdas.v1i3.665>
- Campbell, R. (2008). The psychological impact of rape victims. *American Psychologist*, 63(8), 702–717. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.63.8.702>
- Harris, A., & Spillane, J. (2008). Distributed leadership through the looking glass. *Management in Education*, 22(1), 31–34. <https://doi.org/10.1177/0892020607085623>
- Hidayah, N. (2016). Peran Kepala Sekolah dalam Pengembangan Lingkungan Belajar yang Inovatif. *Jurnal Ta'limuna*, 5(1), 15–25.
- Lapir, C. N. (2024). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Perspektif Sekolah Efektif. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 6(4), 3123–3130. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7172>
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management*, 40(1), 5–22. <https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1596077>
- Ma'ruf, E. Y. (2021). Peran Kepala Sekolah dalam Menanggulangi Perilaku Kekerasan Siswa terhadap Guru di SD Negeri 93 Manado. IAIN Manado.

- Muljawan, A. (2018). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengelola Sekolah Efektif. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 19(1), 146–157. <https://doi.org/10.36769/asy.v19i1.29>
- Nurratri Kurnia Sari, & Linda Dian Puspita. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. *Jurnal Dikdas Bantara*, 2(1). <https://doi.org/10.32585/jdb.v2i1.182>
- Rangkuti, F., & Maksum, A. (2019). Peran Kepala Sekolah dalam Membangun Sekolah Ramah Anak. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(3), 312–320.
- Sanchez, E., Robertson, T. R., Lewis, C. M., Rosenbluth, B., Bohman, T., & Casey, D. M. (2001). Preventing Bullying and Sexual Harassment in Elementary Schools. *Journal of Emotional Abuse*, 2(2–3), 157–180. https://doi.org/10.1300/J135v02n02_10
- Selian, S. N., & Restya, W. P. D. (2024). Peran Kepala Sekolah dalam Mengatasi Bullying di Sekolah. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(2), 531–539. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i2.751>
- Siregar, E. (2023). Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SD Negeri 164519 Kota Tebing Tinggi. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 9(2). <https://doi.org/10.30596/edutech.v9i2.16859>
- Sukmawati, L. (2021). Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah Dasar. Universitas PGRI Semarang.
- Susanto, E. (2023). Peran Sekolah dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Grobogan. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 7(3), 2687–2700.
- Yusuf, M. (2023). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menciptakan Kenyamanan Lingkungan Kerja di SMP IT Al Madinah. *Edum Journal*, 5(2), 77–85.